

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Darus Badruzaman, Mariam. Asas-Asas Hukum Perikatan, (Medan: FHUSU, 1970).
- Darus Badruzaman, Mariam. Aneka Hukum Bisnis Cetakan I, (Bandung: Penerbit Alumni, 1994).
- Effendi, Satria, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, (Jakarta: Kencana, 2004).
- Hadjon, Philpus M. dan Tatiek Sri Djatmiati, Argumentasi Hukum, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005).
- Ibrahim, Johny. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. (Malang: Bayu Publlishing, 2006).
- Ismi, Hayatul, Hukum Adat Indonesia, (Riau: UR Press, 2015).
- Khairandy, Ridwan. Itikad Baik dalam Kontrak di Berbagai Sistem Hukum, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2017).
- M. Hadjon, Philipus. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011).
- Manan, Abdul, Aneka Masalah Hukum Perdata di Indonesia, (Jakarta: Kencana Pranada Kartini, 2008).
- Manan, Abdul, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008).
- Mardani, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014).
- Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011).
- Muhammad, Abdulkadir. Hukum dan Penelitian Hukum. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004).
- Muhammad, Abdulkadir. Hukum Perikatan, (Bandung: Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-3, 1992).
- Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, (Gajah Mada University Press: Yogyakarta, 2011).

S.T Kansil, C. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002).

Salim HS, Hukum Kontrak- Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).

Santoso, Urip., Perolehan Hak Atas Tanah, (Jakarta: Prenada Media, 2015).

Soepomo, Bab-bab Tentang Hukum Adat, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2007).

Subekti, Hukum Perjanjian Cetakan 21 (Jakarta: Intermasa, 2005).

Subekti, R., Aneka Perjanjian, (Bandung: Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014).

Suriyaman Mustari Pide, A. Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014).

Suwardi, Hukum Agraria, (Jakarta: Badan Penerbit IBLM, 2005).

Yahya Harahap, M. Hukum Acara Perdata, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. Ke-2, 2005).

2. Jurnal

Arimurti, Asyuna Triana Mohammad Fajri Mekka Putra. "Perspektif terhadap Pembatalan Akta Hibah Pejabat Pembuat Akta Tanah atas Hibah yang Tidak Diberikan secara Cuma-Cuma (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kalianda, Nomor 31/Pdt.G/2020/PN KLA)". *Jurnal Pakuan Law Review*, Volume 08 Nomor 01, Januari-Juni 2022.

Larasati, Fadhila Restyana, and Mochammad Bakri. "Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 pada Putusan Hakim dalam Pemberian Perlindungan Hukum bagi Pembeli Beritikad Baik." *Jurnal Konstitusi* 15, Nomor 4 (2019).

Permadi, Iwan. "Perlindungan hukum terhadap pembeli tanah bersertifikat ganda dengan cara itikad baik demi kepastian hukum." *Yustisia Jurnal Hukum* 5, Nomor 2 (2016).

Sekarini, Marsha Angela Putri, and I. Nyoman Darmadha. "Eksistensi Asas Kebebasan Berkontrak Berkaitan Dengan Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* (2018).

Suroso, Joko Trio, “Pembatalan Pemberian Akta Hibah yang Melanggar Legitieme Portie ditinjau dari Persepektif Hukum Perdata Indonesia”, Wacana Paramarta, Jurnal Ilmu Hukum Volume 20 Nomor 20 Tahun 2021.

3. Peraturan atau Perundang-Undangan

Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043).

Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696).

Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3746),

Indonesia. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Sertipikat Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 12).

Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630).